



PIMPINAN DPRD PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 16 /DPRD/IX/2022

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023

PIMPINAN DPRD PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;
 2. Surat Gubernur Gorontalo Nomor 180/Biro Hukum/944 tanggal 12 September 2022 perihal Propemperda Tahun 2023;
 3. Rapat Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 tanggal 12 September 2022;
 4. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan kewenangan provinsi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD Provinsi Gorontalo atau Gubernur Gorontalo dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023.

- KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, maka DPRD Provinsi Gorontalo atau Gubernur Gorontalo melaksanakan agenda Program Pembentukan Peraturan Daerah yang tersisa pada tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 September 2022

DPRD PROVINSI GORONTALO
KETUA,


PARIS R.A. JUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRD
PROVINSI GORONTALO,


YOLANDA RAHMAN, SE., M.Ec.Dev.
NIP. 19770124.200612.2.007

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Yth. Pj. Gubernur Gorontalo.
3. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Yth. Ketua-Ketua Komisi DPRD Provinsi Gorontalo.
5. Yth. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo.
6. Yth. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo.
7. Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO.
 NOMOR : 16 /DPRD/IX/2022
 TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2022
 TENTANG : PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	LAMA		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. RANPERDA YANG BERASAL DARI DPRD.											
1	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol	Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang perlu diatur dan disesuaikan dengan kondisi saat ini terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo.		√	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.		√	Satpol PP	Tahun 2023	
2	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	Tindaklanjut UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 6 Tahun 2021.	√		Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.			Dinas PM dan PTSP	Tahun 2023	
3	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal.	Untuk meningkatkan pemberdayaan pengusaha lokal dalam menghadapi persaingan global serta kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.	√		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	√		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tahun 2023	

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	LAMA		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Provinsi.	√		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa urusan yang berkaitan dengan kepemudaan telah menjadi urusan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah bersamaan dengan urusan bidang olahraga.	√		Dinas Pemuda dan Olahraga	Tahun 2023	
5	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	Mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo.	√		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	√		Dinas Sosial	Tahun 2023	
II RANPERDA YANG BERASAL DARI GUBERNUR.											
1	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan/Revisi atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030.	Pengintegrasian Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo dengan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi.	√		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.		√	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perikanan dan Kelautan.	Tahun 2023	
2	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Unifikasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Gorontalo.	√		Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.	√		Badan Keuangan	Tahun 2023	

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	LAMA		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang Terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.	Penyesuaian besaran iuran peserta jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	√		Telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Adanya perubahan besaran iuran peserta jaminan kesehatan.	√		Dinas Kesehatan	Tahun 2023	
4	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.	Menjamin penyelamatan arsip sebagai sumber informasi dan mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan di daerah, arsip harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan.	√		Pasal 12 ayat (2) huruf r Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	√		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.	Tahun 2023	
5	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gorontalo Fitrah Mandiri.	Penyesuaian pendirian BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.			Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo.	Tahun 2023	

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	LAMA		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III RANPERDA KUMULATIF TERBUKA.											
1	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.							Badan Keuangan	Tahun 2023	
2	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.							Badan Keuangan	Tahun 2023	
3	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.							Badan Keuangan	Tahun 2023	

DPRD PROVINSI GORONTALO

KE T O A.


PARIS R.A. JUSUF